

AIR UNTUK NEGERI

Edisi 2 - 2023

Hal 2 Bersama Tangani Banjir DKI Jakarta

Hal 4 Tangani Banjir Butuh Peran Masyarakat

Hal 7 Tangani Banjir dari Hulu Hingga Hilir

Hal 11 Mengamankan Wilayah Pesisir dengan Tanggul

Hal 14 Indonesia Siap jadi Tuan Rumah
10th World Water Forum 2024,
Registrasi Telah Dibuka





Bersama Tangani Banjir DKI Jakarta

■ Peresmian Sodetan Ciliwung, DKI Jakarta.

Banjir Jakarta menjadi momok tidak hanya bagi warga Kota Jakarta, tetapi bagi warga lain yang menggantungkan harapan di kota pusat pemerintahan dan pusat bisnis ini. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tidak tinggal diam, tahap demi tahap penanganan banjir telah dilakukan dari tahun ke tahun, dari wilayah ke wilayah.

Sesuai dengan rencana induk (*masterplan*) pengendalian banjir DKI Jakarta, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus melakukan upaya penanganan banjir secara kolaboratif. Langkah ini dilakukan secara bertahap mulai dari hulu hingga hilir.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh melalui kegiatan multisektoral. Tentu saja, program penanganan banjir ini melibatkan seluruh pemilik kepentingan dengan visi

bersama untuk menyelesaikan masalah secara berkelanjutan.

“Tugas dan fungsi seluruh pihak, perlu diterjemahkan di lapangan menjadi ‘Peran dan Tanggung Jawab Bersama’. Kebersamaan dan Kolaborasi harus terus diupayakan sehingga semuanya dapat memahami siapa yang sedang bekerja dan program yang dilaksanakan, termasuk pentingnya keterlibatan masyarakat,” kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu.

Dalam penanganan banjir Jakarta kata Menteri Basuki, salah satu kuncinya adalah kembali ke *masterplan* Sistem Pengendalian Banjir Jakarta yang disusun oleh *Netherlands Engineering Consultants* (NEDECO) pada 1973. Masterplan tersebut telah direview sebanyak dua kali, yakni pada 1997 oleh *Japan International Cooperation Agency* (JICA) dan pada 2007 melalui program *Jakarta Integrated Flood Management Programme* (JIFMP).

Salah satu langkah yang telah dilakukan Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) dalam dukungan penanganan banjir Jakarta sesuai rencana induk di bagian hulu adalah pembangunan dua bendungan kering yakni Bendungan Ciawi dan Sukamahi yang diresmikan oleh Presiden Jokowi pada akhir 2022. Bendungan Ciawi memiliki volume tampung 6.05 juta m³ dengan luas genangan 39,40 hektar.

Di wilayah hulu, selain Bendungan Ciawi juga dibangun Bendungan Sukamahi dengan daya tampung 1,68 juta m³ dan luas area genangan 5,23 hektare untuk mereduksi banjir sebesar 15,47 m³/detik. Pembangunan Bendungan Sukamahi sudah direncanakan sejak tahun 1990-an dan mulai dibangun pada tahun 2017.

Sementara itu di bagian tengah (*midstream*), saat ini Ditjen SDA sedang membangun Sodetan Kali Ciliwung-Kanal Banjir Timur (KBT) yang akan mengalihkan debit Kali Ciliwung ke KBT sebesar 60 m³/detik. Keberadaan Bendungan Ciawi, Bendungan Sukamahi, dan sodetan Kali Ciliwung-KBT akan mengurangi puncak debit banjir di Pintu Air Manggarai sebesar 21 %.

Ditjen SDA juga tengah membangun Pompa Ancol Sentiong yang berkapasitas 50 m³/detik. Dengan progres konstruksi 49,53% (Mei 2023) dan ditargetkan rampung pada Desember 2023, pompa ini akan mengamankan Kelurahan Kemayoran, Sunter Agung, dan Sunter Jaya di

Kecamatan Tanjung Priok dari risiko banjir.

Selain pembangunan Sodetan Kali Ciliwung di *midstream*, Ditjen SDA juga melakukan sejumlah proyek normalisasi sungai di DKI Jakarta. Normalisasi Sungai Ciliwung merupakan bagian dari rencana induk sistem pengendalian banjir (*flood control*) Jakarta dari hulu hingga hilir. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi lebar Sungai Ciliwung menjadi kondisi normal yaitu 35-50 meter.

Lingkup pekerjaan normalisasi ini meliputi perkuatan tebing, pembangunan tanggul, pembangunan jalan inspeksi dengan lebar 6-8 meter di sepanjang sisi Sungai Ciliwung, meningkatkan kapasitas tampung air dari 200 m³/detik menjadi 570 m³/detik, serta penataan kawasan di sekitar Sungai Ciliwung.

Saat ini, selain melakukan pembangunan infrastruktur sumber daya air dari hulu ke hilir untuk pengendali banjir, Ditjen SDA tengah membangun proyek Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN) atau *National Capital Integrated Coastal Development* (NCICD) pada bagian pesisir DKI Jakarta. Proyek ini, merupakan upaya perlindungan terhadap ancaman banjir rob yang meningkat akibat penurunan permukaan tanah (*land subsidence*) dan kenaikan muka air laut, melalui perkuatan dan peninggian tanggul laut dan tanggul muara sungai serta penataan kawasan pesisir pantai utara Kawasan Ibukota Negara dan daerah di sekitarnya. ●



■ Sodedan Ciliwung, DKI Jakarta.

Tangani Banjir Butuh Peran Masyarakat

Pemerintah pusat melalui Ditjen Sumber Daya Air (SDA), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan sejumlah langkah untuk penanggulangan banjir di Kota Jakarta. Sebagaimana diketahui, Jakarta sebagai Kota Metropolitan dengan kepadatan penduduk yang tinggi mempunyai potensi banjir yang cukup besar, salah satunya dikarenakan adanya perubahan tata guna lahan pada sempadan sungai bagian hulu, tengah, dan hilir.

Kondisi aliran sungai, pada bagian hulu, tengah, dan hilir saat ini mengalami degradasi, seperti adanya sedimentasi, okupasi warga, dan juga permasalahan sampah yang menyebabkan kapasitas tampung sungai berkurang. Selain itu, kondisi di bagian pesisir pantai (hilir) diperparah dengan adanya penurunan muka tanah dan kenaikan muka air laut.

Plt. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko berharap, masyarakat tidak membuang

sampah ke sungai dan pantai, serta tidak mendirikan bangunan pada sempadan sungai dan pantai.

Jarot juga berharap masyarakat bisa ikut berpartisipasi menjaga lingkungan dan menjaga fungsi bangunan pengendali banjir di sekitarnya dengan menerapkan Konsep Zero Delta Q. “Dalam melaksanakan pembangunan struktur (bangunan, -red) baik hunian maupun struktur lainnya masyarakat diharapkan dapat menerapkan konsep Zero Delta Q,” ujar Jarot.

Konsep Zero Delta Q merupakan keharusan bagi setiap pengembang atau pelaku aktivitas pembangunan agar tiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air yang akan masuk ke dalam sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai. Hal ini tertuang dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Upaya penanganan banjir Jakarta tidak lepas dari kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dipaparkan Jarot, kolaborasi dalam penanganan banjir di Kota Jakarta pada bagian hilir yakni membuat kesepakatan bersama (MoU) sinergitas dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tanggul pantai dan muara sungai.

Sementara itu, upaya kolaborasi dalam penanganan banjir di Kota Jakarta pada bagian tengah, yakni Pemerintah Pusat melakukan pembangunan normalisasi dan tanggul sungai sedangkan



■ Weir 3 Kanal Banjir Timur, DKI Jakarta.

Pemerintah Daerah menyiapkan pembebasan lahan.

Kemudian upaya kolaborasi dalam penanganan banjir pada bagian hulu Kota Jakarta yakni Pemerintah pusat melakukan pembangunan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi, sementara Pemerintah Daerah menyiapkan pembebasan lahan serta stakeholder lainnya melakukan dukungan terhadap perizinan yang dibutuhkan.

Dalam penanganan banjir Jakarta Dirjen SDA juga tak menampik sejumlah kendala dan penyebab bencana banjir. Misalnya pada bagian hulu terjadi perubahan tata guna lahan yang menyebabkan kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Pada bagian tengah terjadi okupasi warga pada sempadan sungai yang mengurangi kapasitas tampung sungai,

dan pada bagian hilir adanya okupasi warga dan bangunan liar pada sempadan muara sungai dan pantai serta terjadinya sedimentasi yang tinggi pada muara sungai.

Oleh karena itu, dalam upaya penanganan banjir selain peran dari pemerintah baik pusat ataupun daerah Plt. Dirjen SDA berharap keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan dan infrastruktur sumber daya air yang sudah terbangun. ●



Program Pengendalian Banjir

Struktural (Menata perilaku air)

- Membangun tampungan – tampungan air (waduk/embung/kolam retensi/sumur resapan/ABSAH/Biopori)
- Peningkatan kapasitas tampungan sungai (Tanggul Banjir, Normalisasi)
- Membagi air sungai (*Floodway/Kanal*)
- Meningkatkan kecepatan air (*Sodetan/Shortcut, Terowongan/tunnel*)
- Pengendalian sedimentasi. (*Sabodam/checkdam*)
- Penataan drainase. (Sistem Polder, membangun drainase yang benar)
- Mencegah air laut masuk ke darat/rob. (Tanggul Pantai+sistem polder)

Non struktural (Menata perilaku manusia)

- Kegiatan Konservasi
- Partisipasi Masyarakat (Pemeran Utama): Komunitas Peduli Sungai, Sekolah Sungai
- Melakukan Edukasi (SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi)
- Kajian Perizinan yang sesuai dengan peruntukan dan Monitoring Pelaksanaannya: Pemanfaatan Ruang, dan Pemanfaatan Air
- Membangun /Mendorong Partisipasi Seluruh Stakeholder Secara Terintegrasi
- Melakukan Gerakan Konservasi: GNKPA, GERMADAN (Gerakan Penyelamatan Danau)
- Sosialisasi Regulasi kepada Seluruh Masyarakat dan Law Inforcement
- Adaptasi pada floodplain

Tangani Banjir dari Hulu Hingga Hilir

Secara geografis, DKI Jakarta merupakan dataran rendah yang berada di antara hulu sungai dan pesisir sehingga memiliki potensi banjir yang besar.

DKI Jakarta memang sudah lama menghadapi persoalan banjir, bahkan saat pemerintahan Hindia Belanda, warga Batavia (Jakarta) kala itu harus selalu waspada terhadap ancaman banjir yang dapat menerjang kapan saja. Untuk itu Pemerintah Hindia Belanda

pada saat itu merancang konsep besar penanganan banjir Jakarta.

Netherlands Engineering Consultants (NEDECO) pada tahun 1973 membuat masterplan (rencana induk) Sistem Pengendalian Banjir Jakarta. Rencana



■ Soderan Ciliwung, DKI Jakarta.

induk tersebut telah direview sebanyak dua kali, yakni pada tahun 1997 oleh *Japan International Cooperation Agency* (JICA) dan pada tahun 2007 melalui program *Jakarta Integrated Flood Management Programme* (JIFMP).

Salah satu rekomendasi dalam konsep pengendalian banjir yang dikeluarkan NEDECO adalah mengalihkan aliran air sungai yang masuk ke wilayah Jakarta secara efisien dengan cara menggabungkan sistem drainase yang sudah ada, maka pemerintah membangun Kanal Banjir Timur (KBT) yang mengalihkan aliran Sungai Cipinang, Sunter, Buaran, Jatikramat, dan Cakung. Pembangunan KBT merupakan pelengkap dari Kanal Banjir Barat (KBB) yang dibangun pada tahun 1913, KBB mengalihkan aliran Sungai Ciliwung, Sungai Krukut, Sungai Cideng dan Sungai Grogol.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, untuk menangani banjir Jakarta, salah satu kuncinya adalah kembali ke *masterplan* Sistem Pengendalian Banjir Jakarta yang disusun oleh (NEDECO).

Saat ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) terus berupaya membangun infrastruktur pengendali banjir Jakarta. Direktur Sungai dan Pantai, Ditjen SDA, Bob Arthur Lombogia, mengatakan, langkah dan program penanganan bencana banjir di DKI Jakarta dibagi



■ Bendungan Ciawi dan Sukamahi, Jawa Barat.

kebeberapa bagian, yakni bagian hulu, tengah, dan hilir. Pada bagian hulu, untuk melakukan upaya penanganan banjir di Kota Jakarta, maka dibangun dua bendungan bertipe *drydam* yakni Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi yang sudah diresmikan oleh Presiden Jokowi pada akhir 2022.

Bendungan bertipe *dry dam* (bendungan kering) ini, selain berfungsi sebagai pengendali banjir di yang kerap melanda kawasan DKI Jakarta juga akan menjadi ekowisata. Masing-masing bendungan, yakni Bendungan Ciawi punya daya tampung hingga 6 juta m³. Sementara,



Bendungan Sukamahi memiliki kapasitas tampung hingga 1,6 juta m³. Sebagai pengendali banjir, kedua bendungan bisa mereduksi banjir sebesar 11,9% di daerah aliran Sungai (DAS) Ciliwung.

Bob Arthur mengatakan, bendungan yang dibangun sejak 2016 tersebut merupakan salah satu bagian dari *masterplan* sistem pengendalian banjir dari hulu hingga hilir. Dalam melaksanakan rencana induk tersebut, maka Ditjen SDA, Kementerian PUPR melaksanakan sejumlah program pengendalian banjir yang dimulai dari hulu hingga hilir (muara sungai dan pesisir pantai).

Selain membangun dua bendungan bertipe *dry dam* di kawasan hulu, dalam rencana induk yang dibuat sejak masa kolonial Belanda tersebut juga dikerjakan sejumlah proyek lain yakni program normalisasi serta penguatan tebing aliran Sungai Ciliwung. Program tersebut dikerjakan sejak 2013 hingga 2017. Pada tahun 2021 hingga 2022 dilaksanakan program Pengendalian Banjir Sungai Ciliwung Ruas Cawang - Rawajati. “Untuk melanjutkan program Normalisasi Sungai Ciliwung, diperlukan dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” kata Bob Arthur.

Kerjasama tersebut berupa pembebasan lahan di beberapa lokasi prioritas, antara lain Kelurahan Manggarai, Kelurahan Kebon Manggis, Kelurahan Kampung Melayu, Kelurahan Bidara Cina, Kelurahan Rawajati, Kelurahan Cililitan, dan Kelurahan Pejaten.

Pembangunan sodetan Sungai Ciliwung - Kali Cipinang-KBT dilaksanakan pada 2013-2015 sepanjang 600 meter dari *arriving shaft* hingga menuju *outlet* dan dilanjutkan pada 2021-2023 sepanjang 600 meter dari *inlet* sampai *arriving shaft*, pembangunan ini bersama dengan pembangunan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi yang diharapkan dapat mereduksi banjir sebesar 13%.

Selain itu, upaya pengendalian banjir juga dilakukan dengan melaksanakan pembangunan pompa diantaranya adalah *underpass* Kemayoran dilaksanakan dengan tujuan untuk mengatasi genangan



■ Pompa Ancol Sentiong, DKI Jakarta.

yang pernah terjadi di tahun 2020 pada daerah Kemayoran.

Sementara pada Pembangunan Pompa Ancol Sentiong direncanakan akan dilaksanakan dengan 2 tahap, yakni: Pertama, tahap pembangunan Pompa Ancol Sentiong yang dilaksanakan secara MYC pada tahun 2020-2023 dengan membangun dan pemasangan pompa sentiong dengan kapasitas $5 \times 10 \text{ m}^3/\text{det}$ dan CCSP 345 m untuk mengurangi banjir di daerah Kemayoran, Sunter Agung, dan Sunter Jaya.

Kedua adalah pembangunan Pompa Ancol Sentiong Lanjutan yang dilaksanakan secara SYC pada tahun 2023 dengan melakukan penggantian pompa ancil dengan kapasitas $2 \times 7,5 \text{ m}^3/\text{det}$ untuk mengurangi banjir di daerah Pademangan.

Kepala Balai Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWS), Bambang Heri mengatakan, adanya beberapa kendala dalam penanganan banjir di Kawasan DKI Jakarta. Pada di bagian hulu, misalnya ada beberapa diantaranya yakni

adanya perubahan tata guna lahan yang menyebabkan kerusakan DAS.

Sementara, pada bagian tengah adanya okupasi warga pada sempadan sungai yang mengurangi kapasitas tampung sungai bagian hilir. Okupasi warga dan bangunan liar pada sempadan muara sungai dan pantai serta terjadinya sedimentasi yang tinggi pada muara sungai.

Namun begitu dalam hal penanganan banjir ada tiga hal yang menjadi fokus penanganan, yakni: mengurangi luas banjir, mengurangi ketinggian banjir, dan lama (durasi) banjir. “Ketiga hal tersebut merupakan tujuan dari pengendalian banjir,” ujarnya.

Pemanfaatan lahan terbuka untuk kegiatan perekonomian dan permukiman merupakan sebuah keniscayaan dalam membangun peradaban. Tugas kita bersama adalah melakukan upaya pengendalian sehingga bencana banjir tidak mengganggu aktifitas masyarakat saat melakukan kegiatan ekonomi dan aktifitas lainnya. ●



■ Tanggul Muara Baru, DKI Jakarta.

Mengamankan Wilayah Pesisir dengan Tanggul

Pesisir pantai memang menjadi salah satu wilayah penanganan banjir DKI Jakarta. Banjir rob kerap melanda sejumlah wilayah pesisir pantai Jakarta. Laju penurunan muka tanah serta tanggul muara sungai yang tak lagi bisa menahan debit air yang berasal dari aliran sungai, menjadikan air kerap melimpas ke permukiman penduduk. Selain itu, limbah rumah tangga warga di pesisir pantai tak bisa mengalir ke laut akibat elevasi

tanah yang jauh lebih rendah ketimbang permukaan air laut.

Pengendalian banjir di Kota Jakarta, khususnya di bagian pesisir pantai, dikerjakan secara bersama-sama. Salah satu proyek yang terus dikerjakan adalah Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN) atau *National Capital Integrated Coastal Development* (NCICD). Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut dilakukan secara kolaboratif dan gotong royong bersama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Terdapat tiga pilar dalam upaya perbaikan kualitas lingkungan di pesisir Kota Jakarta. Salah satu pilarnya adalah pengendalian banjir. Pilar lainnya adalah upaya

penyediaan air bersih, dan peningkatan kualitas air.

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan beberapa langkah dalam penanggulangan banjir rob di pesisir DKI Jakarta. Diantaranya ialah membuat tanggul di sejumlah titik rawan limpasan air laut dan pembuatan kolam retensi untuk menampung air di wilayah permukiman untuk kemudian dialirkan ke laut menjadi beberapa pengerjaan yang hingga kini terus dilakukan secara berkelanjutan.

Direktur Sungai dan Pantai, Ditjen SDA, Bob Arthur Lombogia mengatakan, pengerjaan tanggul sebagai langkah upaya penangan banjir merupakan salah satu arahan dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Dalam arahannya, Menteri PUPR mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR di wilayah pesisir Kota Jakarta merupakan upaya perbaikan kualitas lingkungan di pesisir Kota Jakarta.

Garis pantai di muara Kota Jakarta kata Bob Arthur Lombogia ada kurang lebih 120 Km, dari jumlah itu ada sekitar 46 Km yang kondisinya kritis. "Kondisi kritis di sini maksudnya adalah sering dilanda bencana banjir dan ada pula wilayah yang tidak memiliki tanggul, sehingga air masuk ke dalam pemukiman warga," ujarnya.

Dalam proyek PTPIN, dibangun tanggul pantai sepanjang 33 Km. Ditjen SDA

telah menyelesaikan pekerjaan tanggul sepanjang 11 Km sedangkan sisanya terdapat 22 Km yang dikerjakan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Kenaikan muka air laut (rob) akan tertahan dengan adanya tanggul pantai, sedangkan polder dan kolam retensi berfungsi mengendalikan meluapnya aliran air sungai baik yang diakibatkan tingginya intensitas hujan maupun aliran air kiriman. "Prinsipnya di dalam PTPIN ini bukan hanya mengendalikan banjir tapi juga memperbaiki kondisi lingkungan, makanya dibangun sejumlah sarana bagi masyarakat," katanya.

Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung di sekitar tanggul juga turut diperhatikan, penyediaan ruang terbuka hijau, lapangan, tempat pelelangan ikan yang menjadi tempat beraktivitas masyarakat. Selain itu, dalam mendukung fungsi tanggul untuk menanggulangi banjir, Ditjen SDA juga membangun kolam retensi dan rumah pompa di sekitar tanggul laut dan tanggul integrasi.

"Selain membangun tanggul pantai dan tanggul di muara sungai, kita juga bertanya apa kebutuhan lain dari warga di sini," kata Ferdinanto, Kepala Satuan Kerja PTPIN/NCICD. Ferdi melanjutkan, di Kelurahan Kali Baru, selain di bangun tanggul pantai setinggi kurang lebih 4 meter, juga memfasilitasi kegiatan sosial dan perekonomian masyarakat, yakni pembangunan fasilitas olahraga.

"Jadi kita tidak hanya berupaya menangani luapan air laut agar



Proyek Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara

2014-2018

2019-2024

Tanggul Pantai

- Pantai Muara Baru **2,375 KM**
- Pantai Kalibaru **2,200 KM**

Tanggul Pantai

- Pantai Kalibaru **1,025 KM**
- Pantai Kamal Muara **0,813 KM**

Tanggul Sungai

- Kali Ancol **1,840 KM**
- Kali Cakung Drain **0,885 KM**
- Sungai Cengkareng Drain **1,835 KM**
- Kali Dadap **4,919 KM**

Kolam Retensi

- Pantai Kalibaru
- Pantai Muara Baru



■ Tanggul Kamal Muara, DKI Jakarta.

tidak masuk ke permukiman warga,” ungkapnya. Dengan bermusyawarah bersama tokoh masyarakat, fasilitas umum berupa lapangan terbuka menjadi pilihan masyarakat Kalibaru. PTPIN hadir tak hanya untuk pengendalian banjir, melainkan juga mencari solusi kegiatan ekonomi masyarakat di pesisir pantai. Misalnya, PTPIN tetap membangun dermaga nelayan. Sehingga, nelayan bisa dengan leluasa menyandarkan kapalnya untuk memindahkan ikan hasil tangkapannya ke daratan.

Selain itu, di wilayah lain misalnya, kegiatan ekonomi masyarakat yakni UMKM berupa pengolahan kerang juga ikut diperhatikan. Limbah kerang yang bercampur dengan limbah rumah tangga,

diupayakan tidak menumpuk di pesisir pantai. “Difasilitasi tempat pembuangan sampah juga,” kata Ferdi. “Karena nilai manfaatnya sangat besar bagi masyarakat,” ujarnya.

Sebagai prioritas pembangunan, ia berharap kerjasama oleh seluruh lapisan masyarakat untuk bahu-membahu mendukung proyek strategis ini. Sebab, manfaatnya akan jauh lebih besar dirasakan untuk masyarakat.

Kini, manfaat tersebut sudah mulai dirasakan oleh masyarakat di sekitar, banjir rob yang kerap datang sudah tidak lagi menghantui masyarakat, fasilitas-fasilitas pendukung lainnya juga sudah banyak digunakan. Manfaatnya yang besar perlu didukung dengan rasa kepedulian yang besar dalam menjaga serta merawat, infrastruktur yang sudah dibangun perlu dukungan masyarakat supaya tetap bermanfaat di kemudian hari. ●

Indonesia Siap jadi Tuan Rumah 10th World Water Forum 2024, Registrasi Telah Dibuka

Pemerintah Indonesia mengajak seluruh elemen masyarakat global untuk mengikuti pendaftaran *early bird* 10th World Water Forum 2024 di Bali. Fase pendaftaran ini dibuka pada 18 Mei hingga 18 November 2023. Pendaftaran 10th World Water Forum dapat diakses melalui situs resmi <https://worldwaterforum.org/>.

Pertemuan 10th World Water Forum di Bali akan mengusung tema “*Water for Shared Prosperity*” dengan beragam diskusi panel subtema seperti *Water for Humans and Nature, Water Security and Prosperity, Disaster Risk Reduction and Management, Governance, Cooperation and Hydro Diplomacy, Sustainable Water Finance, dan Knowledge and Innovation*.

Presiden *World Water Council* (WWC) Loïc Fauchon mengaku optimis Indonesia mampu menjadi tuan rumah dan mengajak seluruh elemen masyarakat global untuk menciptakan solusi bersama atas permasalahan air di dunia.

“Diharapkan 10th World Water Forum dapat dimanfaatkan sebagai ajang pertukaran informasi mengenai isu air dan menciptakan kesepakatan bersama mengenai pengelolaan air yang baik,” kata Loïc Fauchon.

Perhelatan 10th World Water Forum akan dilangsungkan pada 18 Mei hingga 24 Mei 2024 di Bali dan ditargetkan akan dihadiri oleh 10.000 delegasi dari 172 negara yang terdiri dari unsur-unsur Pemerintah, parlemen, swasta, akademisi, praktisi, asosiasi, dan masyarakat.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa gelaran 10th World Water Forum menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk bisa saling bersinergi dengan berbagai pihak, baik dalam dan luar negeri.

“Kesempatan ini patut dimanfaatkan dengan maksimal untuk Indonesia unjuk gigi di mata dunia dan meningkatkan kualitas infrastruktur pengelolaan air dalam negeri. Diharapkan ajang gelaran 10th World Water Forum dapat mengantarkan kita kepada masa depan yang lebih cerah,” kata Menteri Basuki.

Forum Air Dunia ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi seluruh *stakeholder* untuk dapat berbagi ide, praktik, dan solusi terbaik dalam menghadapi tantangan pengelolaan sumber daya air berkelanjutan. ●

Pendaftaran *Early Bird* Sudah Dibuka!

10th World Water Forum

"Water for Shared Prosperity"

18-24 Mei, 2024
di Bali, Indonesia

Daftarkan Segera
dan Dapatkan Harga Khusus!

Kunjungi

<http://worldwaterforum.org>



Periode *Early Bird*

18 Mei - 18 November 2023



#WaterForSharedProsperity





DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



pupr_sda



pupr_sda



PUPR_SDA



www.sda.pu.go.id



pupr_sda

Bekerjasama dengan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

Pembina:

Jarot Widyoko

Tim Pengarah:

Airlangga Mardjono
Titi Kartika Sari

Tim Penyunting:

Kety Fillaily
Argie Rinaldy

Penerbit:

GATRA

Penulis: Arif Sugiono
Desain: Rio Nugroho
Distribusi: GATRA

Gedung Gatra

Jl. Kalibata Timur IV No. 15
Jakarta Selatan 12740
Telp: (021) 797-3535

Gedung Ditjen SDA, Jalan Pattimura No. 20, Selong,
Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12110